



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SUB UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD RIZA PATRIA
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 180198

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 17.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92.7 m2/92.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.976.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.235.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , WARISAN Rp. 8.610.000.000
4. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, WARISAN Rp. 2.379.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 805.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 283.237.600****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 436.891.728****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 330.000.000**

Sub Total **Rp. 19.055.129.328**

III. HUTANG **Rp. ----**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

19.055.129.328

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.